



Kajian Polemik LPG 3 Kg

**Nadia Restu Utami
Indah Lestari
Ali Nur Alizen**

17 Februari 2025

Ringkasan Eksekutif

LPG subsidi tabung 3 kg (Gas Melon) **tidak lagi dijual di pengecer** mulai 1 Februari 2025. Akan tetapi, dalam waktu yang relatif singkat **berbagai permasalahan muncul** atas putusan tersebut. Kesulitan masyarakat mendapatkan LPG 3 kg, antrean panjang di pangkalan, hingga kasus kematian warga usai antre LPG 3 kg. Deskripsi tersebut didukung oleh **Rekaman SNA** yang menangkap percakapan warganet dominan dengan **sentimen negatif sebesar 98,18%** dan tidak tampak pembicaraan bersentimen positif. Sentimen negatif disumbang oleh **influencer politik** hingga **warganet natural**. Perkembangan situasi **berujung pada instruksi Presiden Prabowo** bahwa **pengecer bisa kembali menjual LPG 3 kg** mulai tanggal **5 Februari 2025**.

Meskipun kebijakan tentang pendistribusian tepat sasaran **telah dipersiapkan dalam waktu yang relatif lama**, penerapan kebijakan dijalankan **tanpa memastikan kesiapan di level masyarakat**. Dari sisi **komunikasi**, pemerintah dan Pertamina gagal mensosialisasikan perubahan sistem pendistribusian LPG 3 kg ke masyarakat yang berujung pada kepanikan di masyarakat ketika pembelian LPG hanya dapat dilakukan di pangkalan. Dari sisi **distribusi**, pangkalan belum mampu menggantikan peran pengecer yang selama ini mampu memenuhi kebutuhan LPG 3 kg masyarakat secara cepat dan mudah. Sebagai tambahan, **ketidakjelasan landasan hukum mengenai definisi 'rumah tangga'** yang berhak membeli LPG 3 kg turut menjadi **batu sandungan** dalam mewujudkan implementasi distribusi LPG 3 kg yang tepat sasaran.

Pemerintah tampak khawatir dengan fakta **beban subsidi LPG yang kian meroket**. **Konsumsi LPG 3 kg kian melambung tinggi** sejak konversi minyak tanah ke LPG yang dimulai tahun 2008. Puncaknya pada tahun 2022, subsidi LPG mencapai Rp100 triliun. Perhitungan rerata dalam periode 2011-2023, pemerintah mensubsidi konsumsi LPG masyarakat setiap tahunnya hampir 90%. Tambahan lagi, **pengadaan LPG** di Indonesia hingga saat ini masih sangat **bergantung pada impor**. Apabila efektivitas pendistribusian tidak dibenahi segera, APBN akan terperangkap dalam beban subsidi yang kian meningkat setiap tahunnya.

Kebijakan ini layak diimplementasikan, namun diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk **memastikan sosialisasi** diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kesiapan **infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan LPG 3 kg** harus diprioritaskan. Misalnya dengan menyelesaikan proses transisi pengecer menjadi pangkalan sehingga akses masyarakat ke LPG 3 kg tetap terjaga. **Kepastian regulasi juga diperlukan**, terutama **dalam mendefinisikan rumah tangga penerima**. Terakhir, pemerintah harus **memastikan tertib administrasi di tingkat pangkalan**, baik dari segi kriteria penerima manfaat, volume, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg. Dengan langkah-langkah tersebut, pendistribusian LPG 3 kg yang tepat sasaran dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Lini Masa Kebijakan KPG 3 Kg

TIDAK DITEMUKAN



Potret Polemik LPG 3 Kg

CNBC INDONESIA HOME MARKET MY MONEY NEWS TECH LIFESTYLE SHARIA ENTREPRENEUR

CNBC Indonesia > News > Berita

Mulai 1 Februari 2025, Layanan Penjualan LPG 3 Kg ke Pengecer Disetop

Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia

31 January 2025 14:34



Foto: Pekerja menurunkan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) dari truk di pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina di Kawasan Jakarta, Selasa (2/1/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Sabtu, 1 Feb 2025

NEWS BISNIS BOLA TV SHOWBIZ TEKNO FOTO HOT CEKFAKTA ISLAMI CRYPTO C11

NEWS Politik Peristiwa Megapolitan Rajut Liputan Khusus Infografis Zona MPF

Warga Meninggal Usai Antre LPG 3 Kg, Kementerian ESDM Minta Maaf

Kementerian ESDM meminta maaf kepada masyarakat atas antrean saat pembelian LPG 3 Kg, sehingga diduga mengakibatkan seorang warga meninggal.

Dicky Agung Prihanto
Diperbarui 04 Feb 2025, 15:23 WIB



Dirjen Migas Kementerian ESDM Achmad Muchlisin menemui warga yang mengantre membeli LPG 3 Kg di pangkalan kawasan Sukmajaya, Depok, Selasa (4/2/2025). (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)

Selasa, 4 Feb 2025

CNBC INDONESIA HOME MARKET MY MONEY NEWS TECH LIFESTYLE SHARIA ENTREPRENEUR

CNBC Indonesia > Tech > Berita Tech

Medsos Banjir Penampakan Warga RI Serbu Pangkalan Gas LPG 3 Kg

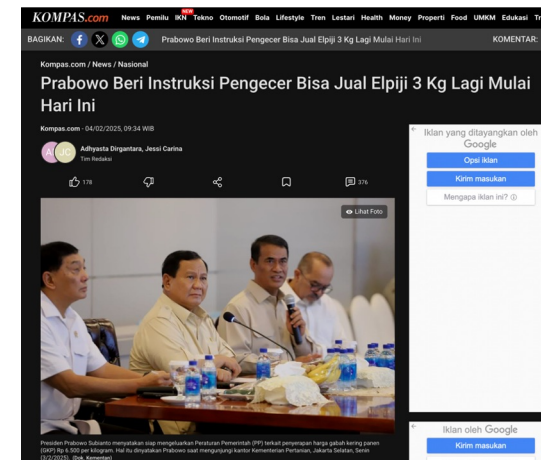
Intan Rakhmayanti Dewi, CNBC Indonesia

03 February 2025 19:15



Foto: Antrean mengular masyarakat yang ingin membeli gas tabung 3Kg di depan agen di Jalan Aria Putra, Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan, Senin (3/2/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Senin, 3 Feb 2025



Selasa, 4 Feb 2025

Masalah Yang Muncul

1. Jarak pembeli ke pangkalan LPG lebih jauh dari pengecer
2. Antrian panjang di pangkalan, akibat supply yang terbatas
3. Oknum pangkalan yang tidak mau menjual LPG 3 kg

Per 1 Februari 2025, pemerintah **memberhentikan layanan penjualan LPG 3 kg melalui pengecer** dengan alasan keinginan menciptakan efisiensi subsidi melalui 1) subsidi LPG tepat sasaran; 2) Harga jual sesuai aturan; dan 3) meminimalisir penyelewengan gas bersubsidi.

Namun demikian, **berbagai permasalahan muncul** dalam waktu yang relatif singkat. Kesulitan masyarakat mendapatkan LPG 3 kg, antrean panjang di pangkalan, hingga kasus kematian warga usai antre LPG 3 kg. Perkembangan situasi **berujung** pada **instruksi Presiden Prabowo** bahwa **pengecer bisa kembali menjual LPG 3 kg mulai tanggal 5 Februari 2025**.

Nodes : 3.521
Akun : 3.471
Edge : 9.717
Post : 206.113

Jagat Cuit

Polemik Gas LPG 3 Kg

(1 – 5 Februari 2025)

Negatif 98,18%

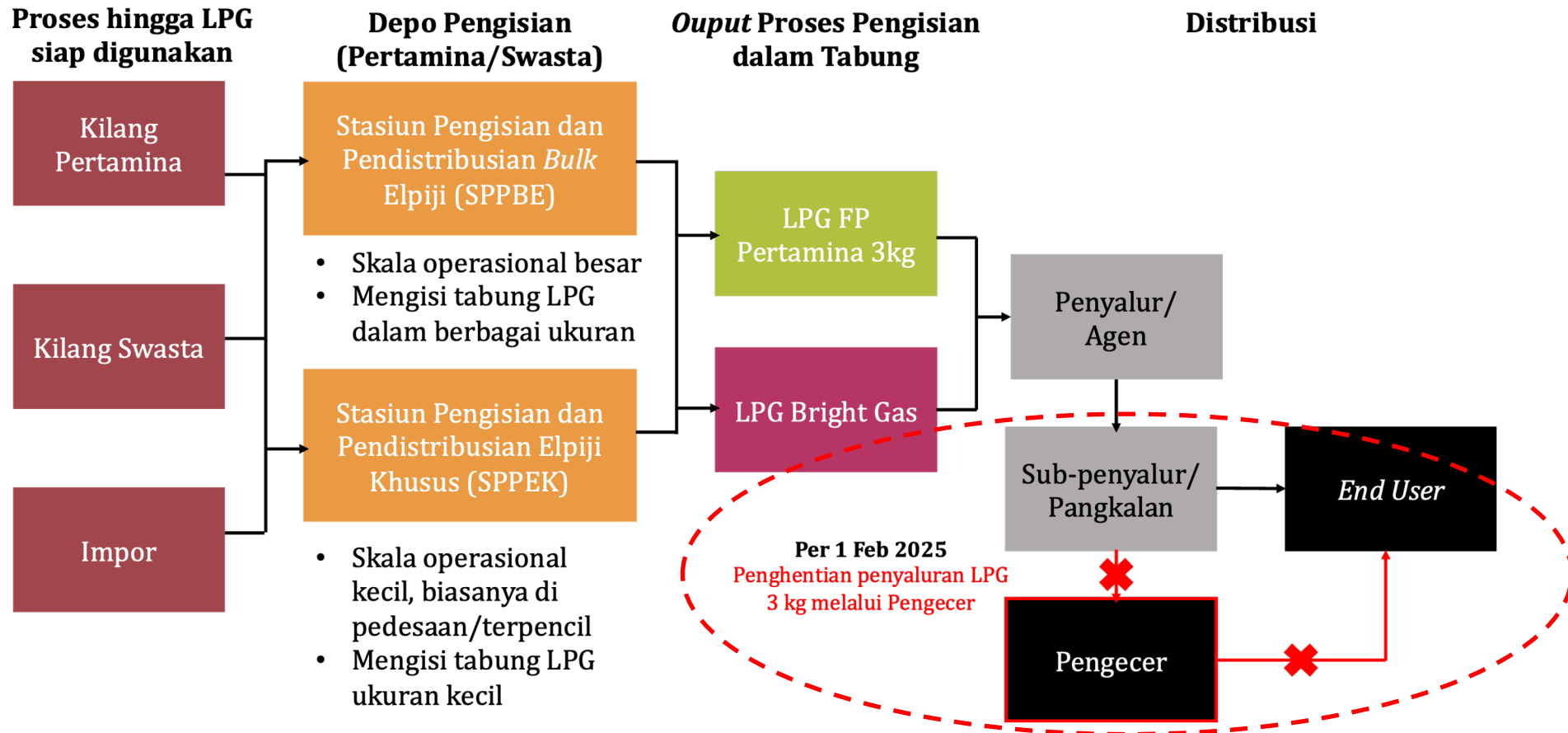
- Unggahan gambar Garuda Hitam dengan tagar #PeringatanDarurat dan #IndonesiaGelap berisi kritik: Pendidikan dan Kesehatan menjadi program dukungan, upah karyawan MBG telat dibayar, muncul kasus keracunan namun mengirim buzzer untuk turun tangan, subsidi LPG 3 Kg ditarik ulur sampai warga kesulitan dan menyebabkan korban nyawa, tukin dosen belum dibayar, dan proyek *food estate* yang ditentang masyarakat adat Papua.
- Warga menyalahkan Bahlil sebagai kacung Jokowi yang harus bertanggung jawab atas kelangkaan Gas LPG 3 Kg
- Warga menduga ada musang berbulu domba di dalam kabinet Prabowo. Warga berharap Prabowo segera memutus mata rantai pembusukan kabinet.
- Warga mengeluh tidak tepatnya distribusi Gas LPG karena masih digunakan kelompok menengah atas seperti ASN dan Raffi Ahmad
- Warga membagikan potret antrean panjang untuk mendapat gas 3 Kg
- Warga masih mengantre meski instruksi Prabowo mengembalikan penjualan Gas LPG 3 Kg ke pengecer
- Kelangkaan Gas LPG 3 Kg adalah dampak dari kebijakan rezim kawin paksa
- Warga mengeluh pangkalan LPG PT Cahaya Gasindo Utama di Wisma Tajur, Ciledug, Tangerang menolak menjual gas kepada warga.
- Warga kritik GP Ansor yang berusaha mengalihkan kelangkaan Gas LPG dengan isu radikalisme dan kebangkitan HTI
- Meme Gas LPG: Zaman Mertua antre minyak tanah kini 2025 zaman menantu antre tabung gas
- Warga mengeluhkan Hukum Tata Negara yang berantakan karena kebijakan semrawut terkait Gas LPG 3 Kg yang diberlakukan Menteri ESDM, Pertamina yang dipanggil untuk pertanggungjawaban oleh DPR, Presiden mencabut aturan larangan pengecer dan pengumumannya dilakukan wakil ketua DPR
- Warga mendesak Prabowo untuk memecat Bahlil dari menteri ESDM
- Kelangkaan gas untuk menutupi kasus pagar laut dan masalah *Coretax* yang masih membuat sulit perusahaan untuk menerbitkan faktur
- Kisruh langkanya Gas LPG menjadi penanda Bahlil melecehkan Prabowo. Bahlil sebagai loyalis Jokowi menerapkan kebijakan sebelum mekanismenya diatur
- Partai socmed menyebut aturan peruntukan Gas LPG 3 Kg adalah untuk semua lapisan rumah tangga, terlepas miskin atau kaya. Tulisan “hanya untuk masyarakat miskin” adalah upaya agar gas Bright Pertamina laku. Akun ini juga mengkritik Bahlil tidak mengerti subsidi yang diberikan negara bukan ke agen melainkan langsung ke Pertamina.

Netral

- Unggahan yang tidak berkaitan dengan isu Polemik Gas LPG 3 Kg namun menggunakan diksi berkaitan



Distribusi LPG di Indonesia



Alur distribusi LPG di Indonesia secara sederhana dapat dibagi dalam **empat tahapan** utama. Di Indonesia produksi LPG dilakukan oleh Pertamina dan pihak swasta. Selain itu, Indonesia memenuhi kebutuhan LPG melalui impor. Pascaproduksi, LPG dikirimkan **depo pengisian** untuk diisi ke dalam tabung berbagai ukuran sesuai kebutuhan. Sebagai tahap akhir LPG **didistribusikan** oleh **pangkalan** ataupun **pengecer** ke konsumen tingkat akhir.

Kelangkaan LPG 3 kg yang berlangsung pada awal Februari dipicu oleh kebijakan pemerintah yang **tidak lagi memperbolehkan pengecer** menjual LPG 3 kg. Pemerintah ingin **mengonsentrasikan** penjualan melalui **pangkalan** karena pangkalan memiliki kewajiban **mencatat transaksi penjualan** LPG 3 kg secara digital melalui *merchants apps* (MAP). Mekanisme tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mewujudkan distribusi LPG yang lebih efektif dan transparan ke depan.

Informasi Dasar Pengguna LPG 3 Kg

Penerima Subsidi LPG 3 Kg

Rumah Tangga

Pengguna LPG Tertentu yang mempunyai legalitas penduduk dan menggunakan LPG Tertentu untuk memasak dalam lingkung rumah tangga

Usaha Mikro

Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makan Keliling, Kedai Minum, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minum Keliling/Tempat Tidak Tetap

Petani Sasaran

Petani yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 hektar dan melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan serta memiliki pompa air dengan daya paling besar 6,5 *horse power*

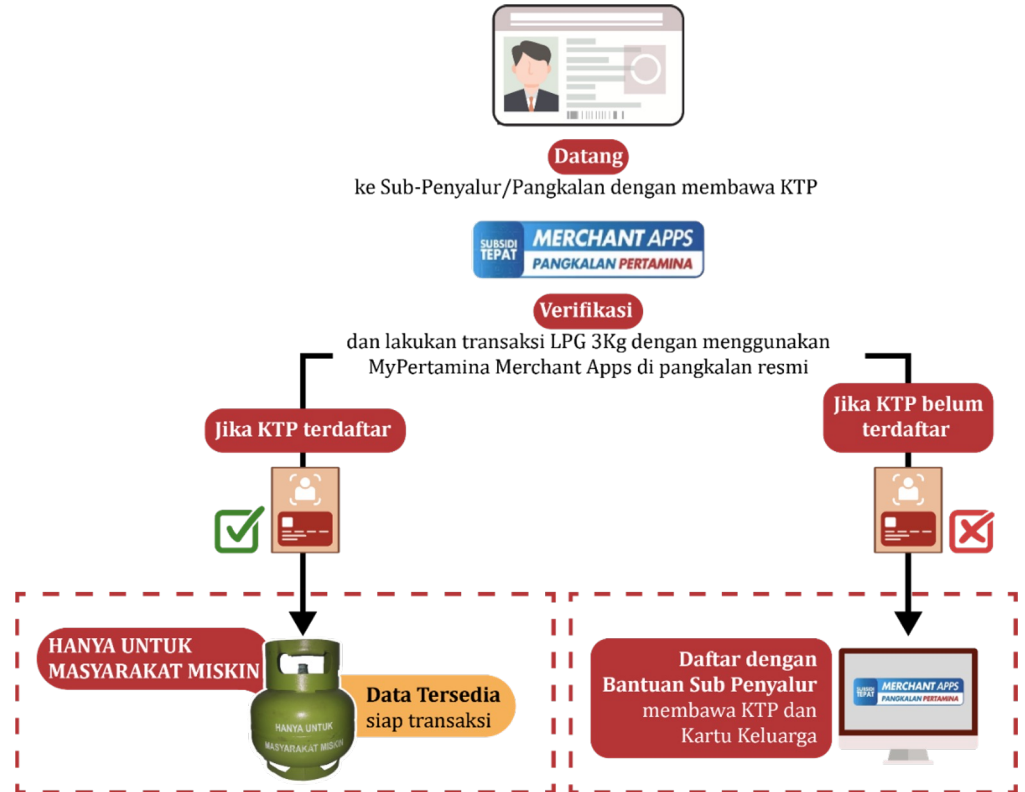
Nelayan Sasaran

Nelayan yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk kebutuhan hidup yang memiliki pompa penangkap ikan berukuran paling besar 5 gros ton dan menggunakan mesin penggerak dengan daya maksimal 13 *horse power*

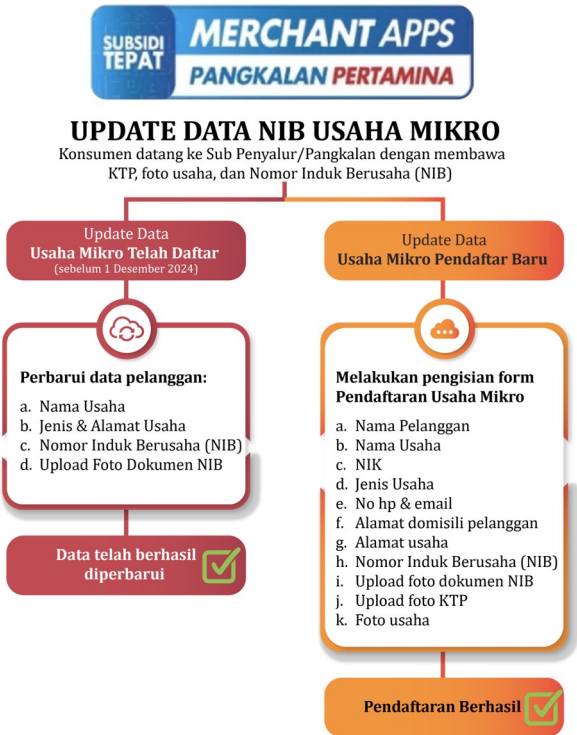
Definisi yang kabur mengenai '**Rumah Tangga**' yang berhak membeli LPG 3 kg pada landasan hukum distribusi LPG 3 kg dipandang menjadi salah satu **batu sandungan** dalam mewujudkan distribusi LPG 3 kg yang tepat sasaran. Tinjauan terhadap landasan hukum distribusi LPG 3 kg mencatat setidaknya dua peraturan yang membahas tentang **kelompok penerima LPG 3 kg**, yaitu **Perpres No. 38 Tahun 2019** dan **Kepmen ESDM No. 37.K/MG.05/MEM.M/2023**. Meskipun demikian, **penjelasan** mengenai rumah tangga yang ditemukan hanya **bersifat umum, tidak pula menyebutkan** tentang **prasyarat** 'masyarakat miskin' sebagai yang berhak menjadi penerima LPG 3 kg. Dengan demikian, alokasi LPG 3 kg untuk masyarakat miskin tampak **sebatas imbauan** dengan mengharapkan kesadaran masing-masing masyarakat.

Panduan Pendaftaran Pengguna LPG 3 Kg

Rumah Tangga



Usaha Mikro



Pemerintah telah mempersiapkan kebijakan tentang pendistribusian LPG 3 kg cukup lama. Keputusan Dirjen ESDM No. 99.K/MG.05/DJM/2023 yang mengatur tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran menetapkan bahwa pendataan tentang pengguna LPG mulai diberlakukan 1 Maret 2023. Sosialisasi tentang panduan pendaftaran bahkan telah disebarluaskan dengan harapan masyarakat dan para pelaku usaha tertib melaksanakan kebijakan yang berlaku. Akan tetapi faktanya, rencana penertiban distribusi LPG 3 kg yang seharusnya sudah dimulai per 1 Januari 2024, belum mampu terealisasi dengan efektif.

Perbandingan Anggaran Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya

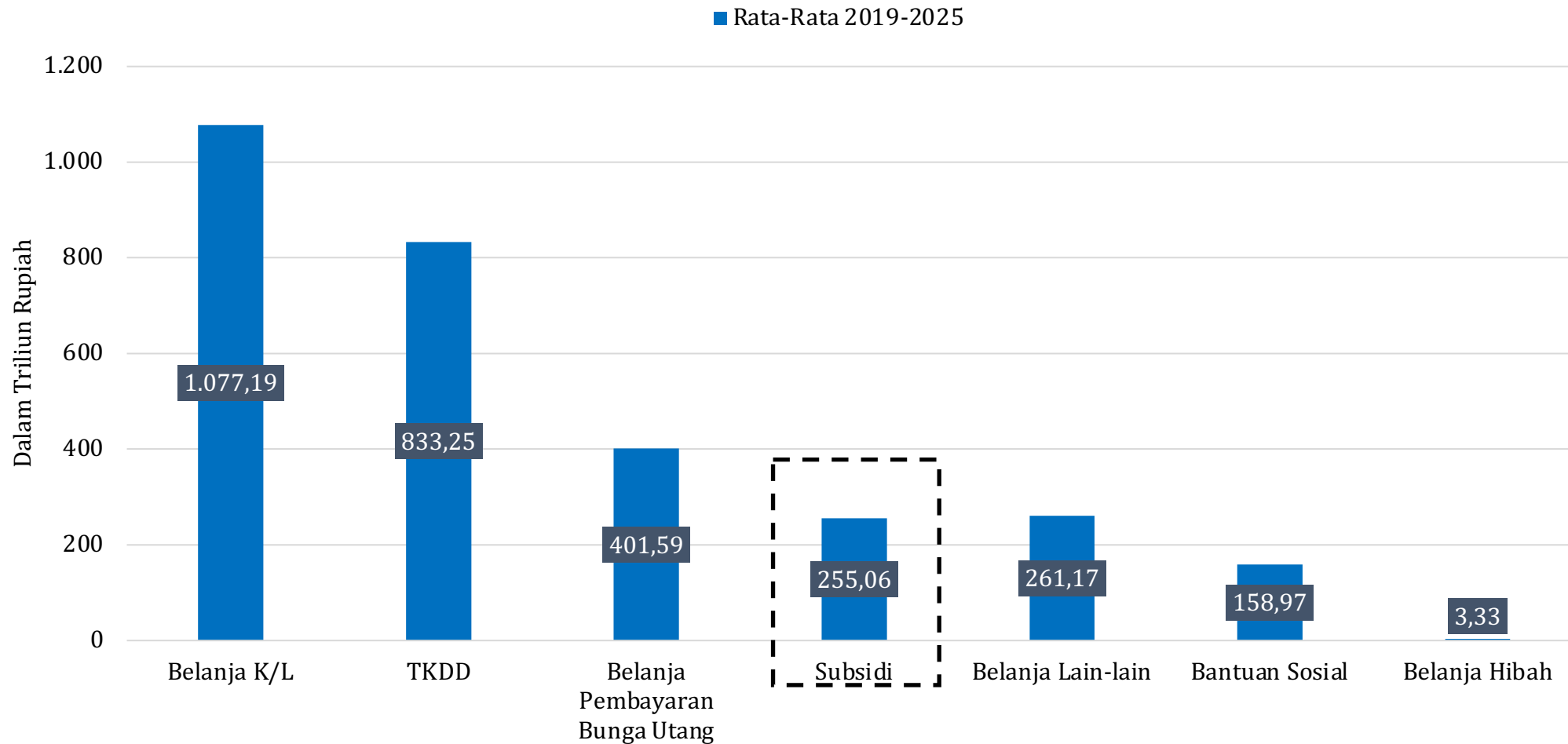
Uraian	LKPP 2019	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	RAPBN 2025	Perubahan 2024-2025
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.496,31	1.832,95	2.000,70	2.280,02	2.239,79	2558,20	2693,20	5%
1. Belanja Pegawai	376,07	380,53	387,75	402,44	412,71	460,86	513,23	11%
2. Belanja Barang Jasa	334,42	422,34	530,06	426,15	432,71	436,88	342,61	-22%
3. Belanja Modal	177,84	190,92	239,63	240,57	303,04	338,95	190,64	-44%
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	275,52	314,09	343,5	386,34	439,88	498,96	552,85	11%
5. Subsidi	201,8	196,23	242,09	252,81	269,59	313,85	309,05	-2%
6. Belanja Hibah	6,48	6,28	4,32	5,8	0,22	0,01	0,20	2971%
7. Bantuan Sosial	112,48	202,53	173,65	161,52	156,6	153,31	152,70	0%
8. Belanja Lain-lain	11,7	120,04	79,7	404,39	225,02	355,41	631,90	78%
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	812,97	762,53	785,71	816,23	881,43	853,99	919,87	8%
1. Transfer ke Daerah	743,16	691,43	713,85	748,32	811,57	783,13	848,87	8%
a. Dana Perimbangan	711,28	652,1	679,59	719,57	785,05	755,60	824,16	9%
b. Dana Insentif Daerah	9,69	18,46	13,46	6,99	7,91	7,84	6,00	-23%
c. Dana Otsus & Keistimewaan	22,18	20,8	20,88	21,76	18,61	19,69	18,72	-5%
2. Dana Desa	69,81	71,1	71,85	67,91	69,86	70,86	71,00	0%
Jumlah Belanja Negara	2.309,29	2.595,48	2.786,41	3.096,26	3.121,22	3.412,20	3.613,10	6%

Dalam semangat efisiensi, pemerintah juga **mengurangi subsidi** tahun ini sebesar 2%. Penurunan ini merupakan yang **pertama kali sejak 5 tahun terakhir** di mana anggaran belanja subsidi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Di satu sisi, **Belanja Lain-Lain meningkat tajam mencapai 78%** yang dianggarkan **untuk antisipasi risiko bencana**, fiskal, ketahanan pangan, serta belanja lainnya yang terprogram meliputi (1) **belanja bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil presiden**, (2) operasional lembaga SKK migas, (3) ongkos angkut beras di wilayah Papua, dan (4) belanja bantuan operasional layanan pos universal.

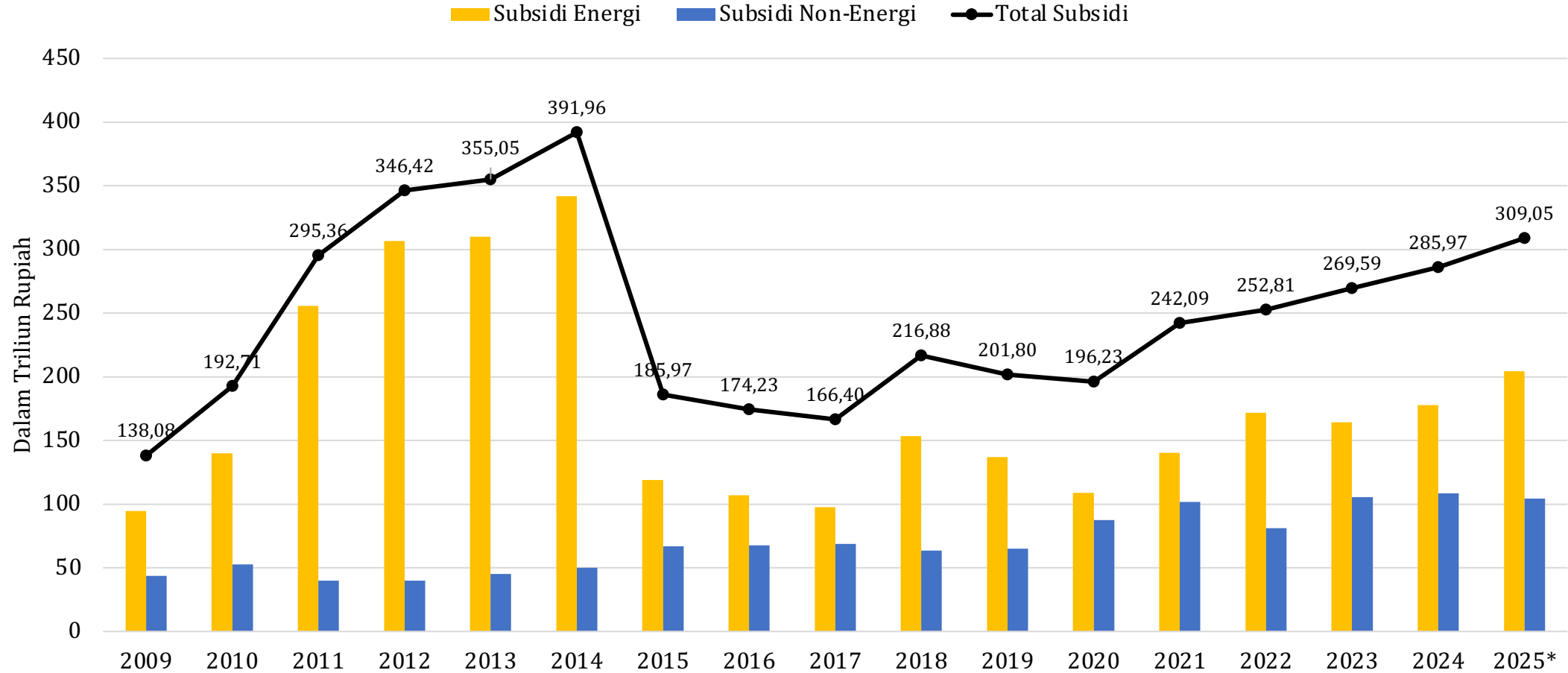
Efisiensi anggaran di tahun 2025 sangat terlihat pada **belanja K/L** di mana Belanja Barang Jasa, Belanja Modal, dan Insentif Daerah turun drastis masing-masing mencapai 22%, 44%, 23%.

Alokasi Belanja Pemerintah 2019 - 2025



Tinjauan terhadap rerata alokasi belanja pemerintah dalam periode 2019–2025 menunjukkan Belanja K/L, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Barang, dan Modal menduduki porsi pengeluaran terbesar mencapai 36,4% diikuti dengan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 28,3%. Sementara itu, **subsidi** memiliki alokasi yang relatif **rendah** di bawah 10%.

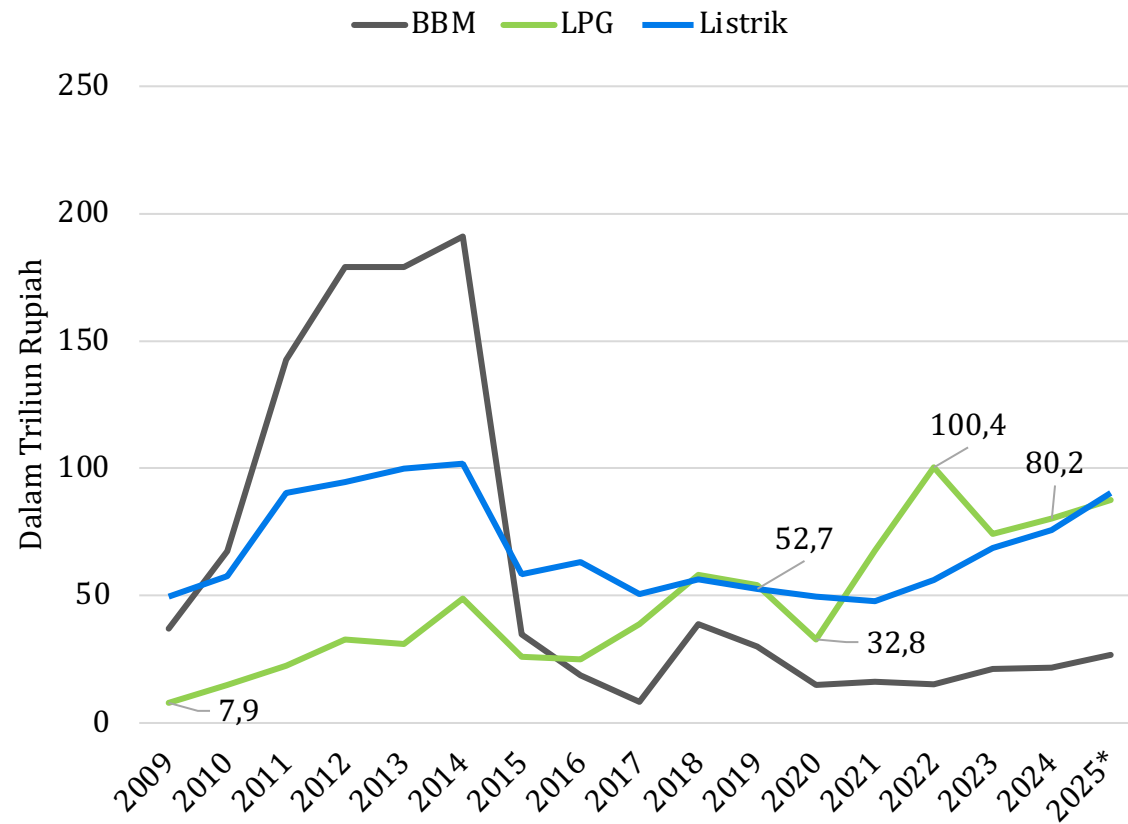
Perbandingan Subsidi Energi dan Non-Energi



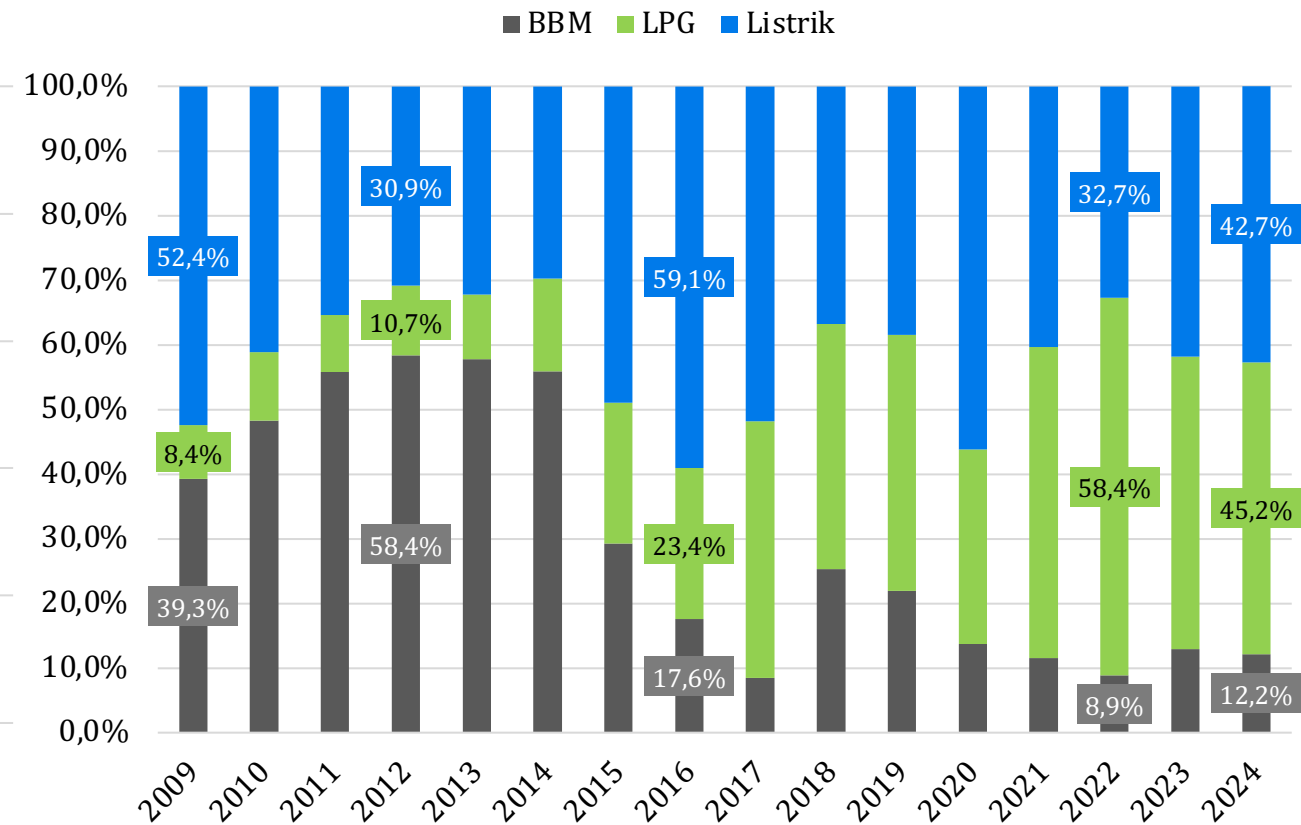
Tren dalam **tujuh belas tahun** terakhir menunjukkan jumlah **subsidi energi** yang **selalu lebih tinggi** dibandingkan dengan subsidi non-energi. Meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2015–2017, subsidi energi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2018. Terlebih **pascaCOVID-19**, **tren peningkatan** subsidi energi **berlanjut** dengan puncak pada tahun 2024 dan diproyeksikan akan kembali mengalami peningkatan pada 2025. Penetapan besaran subsidi energi sangat dipengaruhi oleh asumsi dasar makroekonomi, kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP), kenaikan harga produk LPG, serta melemahnya nilai tukar rupiah mengingat ketersediaan energi didukung melalui impor.

Komponen Subsidi Energi

Realisasi Anggaran Subsidi Energi

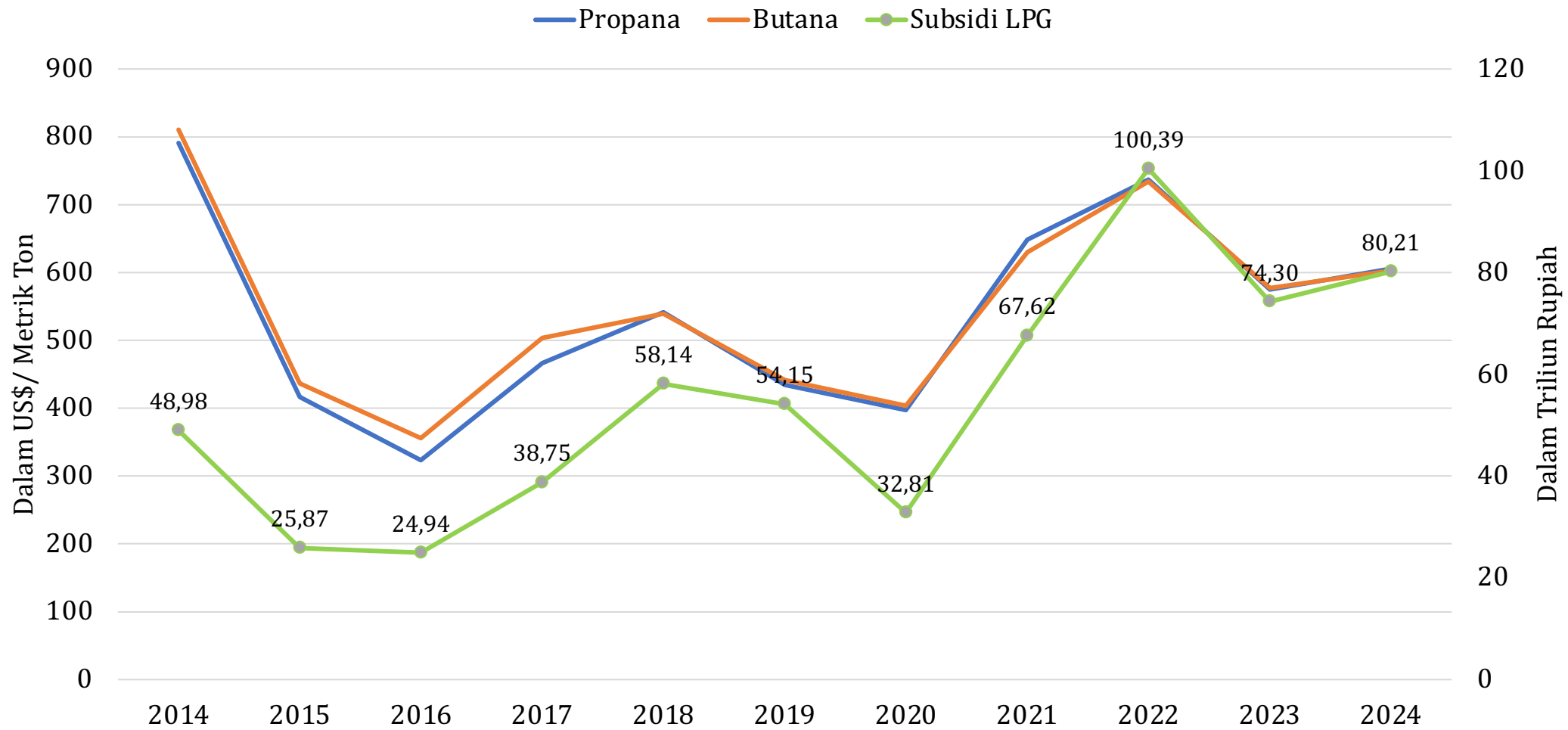


Proporsi Subsidi Energi



Pantauan terhadap nilai subsidi energi menunjukkan **LPG** memperoleh nilai subsidi **terendah** dibandingkan BBM dan Listrik pada **tahun 2009**. Akan tetapi, **sejak tahun 2016** porsi subsidi LPG mulai **mengungguli** subsidi BBM hingga 2024 LPG menjadi kelompok penerima subsidi paling banyak sebesar 45,2%. **Puncaknya** pada **tahun 2022**, nilai subsidi LPG menyentuh angka Rp100,4 triliun sebagai akibat dari **meningkatnya harga** produk LPG dan **pembayaran kekurangan subsidi LPG** tahun sebelumnya.

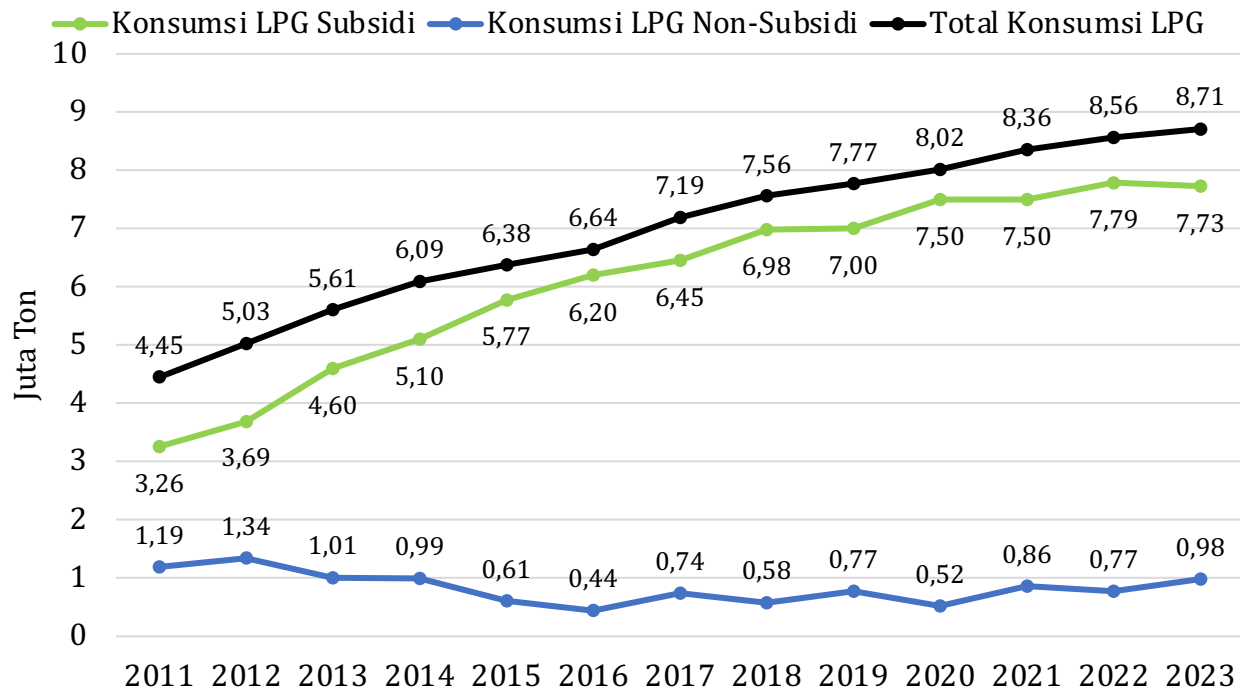
Perbandingan Harga dan Realisasi Anggaran Subsidi LPG



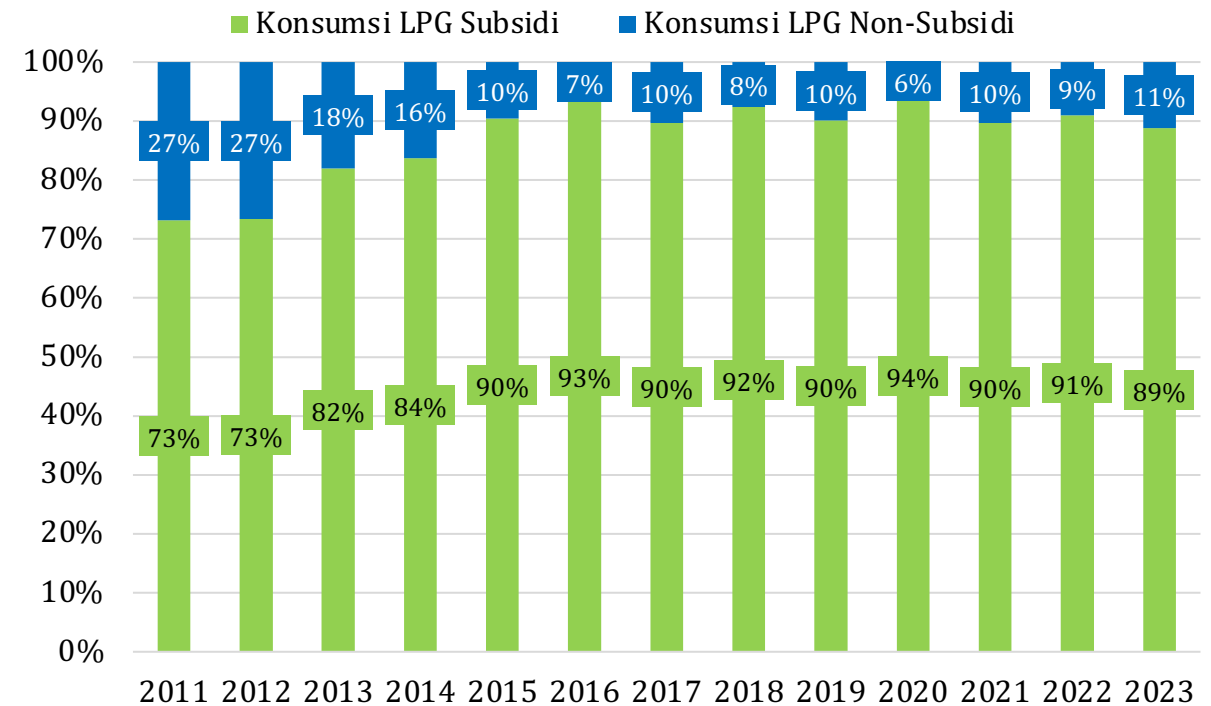
Data menunjukkan kenaikan atau penurunan **anggaran subsidi LPG sangat dipengaruhi oleh harga propana dan butana** yang berfungsi sebagai bahan dasar dalam proses pembuatan LPG. Harga mengacu pada *Contract Price Aramco* yang cenderung berfluktuatif dalam satu dekade terakhir.

Konsumsi LPG di Indonesia

Perbandingan Konsumsi LPG Subsidi dan Non-Subsidi



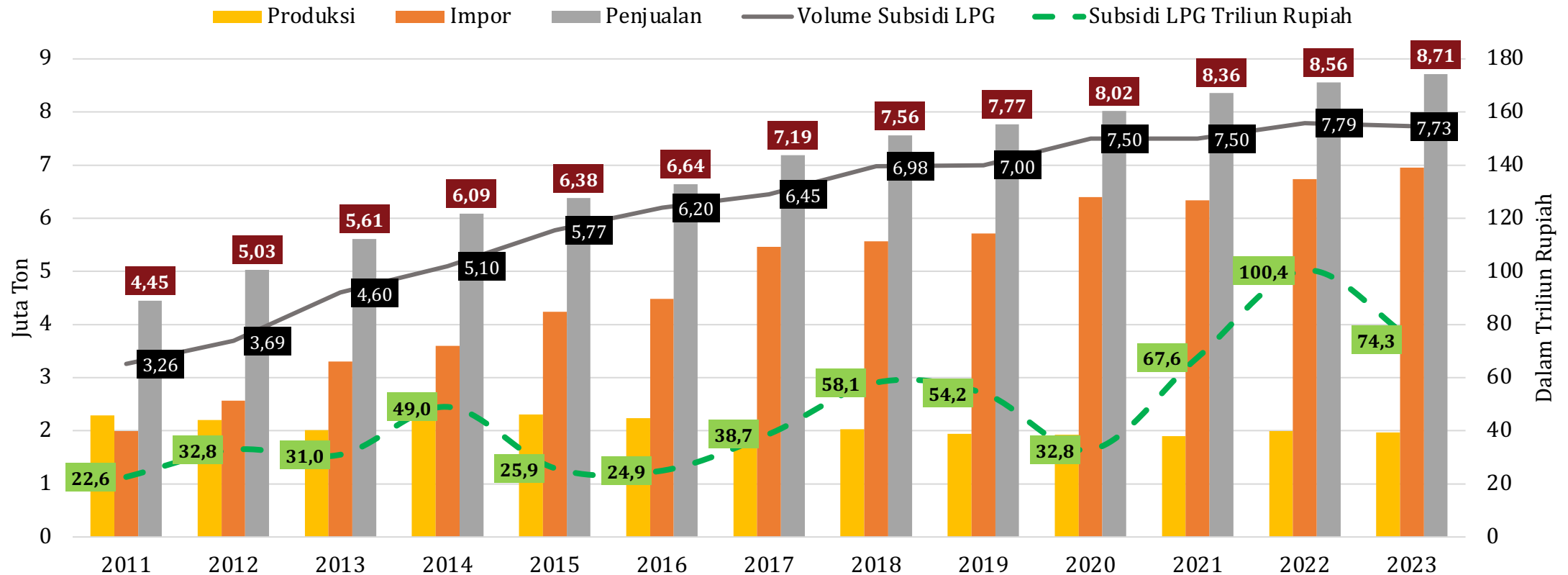
Proporsi Konsumsi LPG Subsidi dan Non-Subsidi



Dalam beberapa tahun terakhir, **anggaran subsidi yang meningkat** juga disebabkan oleh **tingginya volume konsumsi** LPG dalam negeri. Terlihat sejak 2011 konsumsi LPG masyarakat sebesar 4,45 juta ton naik menjadi 8,71 juta ton pada tahun 2023. Perhitungan rerata dalam periode 2011-2023, pemerintah mensubsidi konsumsi LPG masyarakat setiap tahunnya hampir mencapai 90%. Di satu sisi, konsumsi LPG non-subsidi justru mengalami penurunan. Maka dari itu, tidak heran jika pemerintah kian terbebani dengan kebutuhan akan subsidi LPG.

Pengadaan LPG di Indonesia

Pengadaan Gas LPG



Pengadaan LPG dalam satu dekade terakhir cenderung **bergantung pada impor**. Produksi LPG dalam negeri menunjukkan tren menurun. Kondisi ini **mengkhawatirkan** apabila melihat **tren penjualan** LPG yang terus **mengalami peningkatan** dari tahun ke tahun dari 6,38 juta ton pada 2015 menjadi 8,7 juta ton pada 2023. Nilai penjualan tersebut mengindikasikan **konsumsi LPG di Indonesia** yang melonjak. Sejalan dengan itu, tinjauan menemukan tren subsidi LPG yang kian mengalami peningkatan. Berdasarkan RAPBN 2025 pemerintah menetapkan kuota LPG 3 Kg sebanyak 8,17 juta ton. Angka tersebut meningkat sekitar 140 ribu ton dibandingkan dengan tahun lalu.



TERIMA KASIH